Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Positive Accounting Theory (PAT)

Positive Accounting Theory (PAT) dikembangkan pada tahun 1970-an dan 1980-an sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memahami dan menjelaskan praktik akuntansi yang diterapkan oleh entitas. *Positive Accounting Theory* (PAT) merupakan cabang dari akuntansi positif yang berfokus pada penjelasan dan prediksi perilaku organisasi dan individu terkait kebijakan akuntansi. Lahirnya *Positive Accounting Theory* (PAT) pada 1970-an muncul pendekatan baru yang berfokus pada penjelasan perilaku nyata, bukan hanya memberi pedoman normatif.

Kontribusi Watts dan Zimmerman (1978), dalam artikel mereka dengan judul "*Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards*", memperkenalkan konsep dasar *Positive Accounting Theory* (PAT). Mereka menyatakan bahwa kebijakan akuntansi dipilih oleh manjemen berdasarkan insentif ekonomi, kontrak dan tekanan politik. Fokus mereka menjelaskan mengapa entitas memilih kebijakan akuntansi tertentu dan bagaimana faktor eksternal seperti regulasi dan pajak mempengaruhi pilihan.

Pengembangan dan penerapan *Positive Accounting Theory* (PAT) pada tahun 1980-an menjadi kerangka utama dalam penelitian akuntansi empiris. Peneliti mulai menggunakan data historis untuk menguji prediksi *Positive*

Accounting Theory (PAT) tentang pilihan kebijakan akuntansi. Dalam Watts & Zimmerman (1986), teori dasar yang melandasi *Positive Accounting Theory* (PAT), yaitu:

1. *Agency Theory*, menjelaskan hubungan antara manajemen dan pemilik serta bagaimana konflik kepentingan mempengaruhi kebijakan akuntansi.
2. *Political Cost Theory*, menguraikan bagaimana tekanan politik mempengaruhi entitas dalam memilih metode akuntansi tertentu.
3. *Bonus Plan Hypothesis*, menjelaskan bahwa manajemen cenderung memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba untuk memenuhi target bonus.

Aplikasi *Positive Accounting Theory* (PAT) di era modern pada tahun 2000-an perkembangan empiris *Positive Accounting Theory* (PAT) menjadi kerangka umum untuk penelitian akuntansi di berbagai bidang, seperti pelaporan keuangan, pengendlian internal dan audit. Fokus pada praktik akuntansi yang dipengaruhi oleh globalisasi, teknologi dan perubahan regulasi. *Positive Accounting Theory* (PAT) mulai diterapkan untuk menjelaskan praktik akuntansi di sektor publik, termasuk tat kelola keuangan pemerintah.

Positive Accounting Theory (PAT) muncul sebagai tanggapan terhadap kelemahan pendekatan normatif, dengan fokus pada penjelasan dan prediksi praktik akuntansi berdasarkan insentif ekonomi dan kontrak. *Positive Accounting Theory* (PAT) terus berkembang sebagai landasan penting dalam penelitian akuntansi empiris, meskipun menghadapi kritik karena kurangnya fokus pada aspek sosial dan etika hingga kini, *Positive Accounting Theory* (PAT) tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

menjadi teori yang relevan untuk memahami perilaku akuntansi dalam konteks organisasi modern.

Penerapan *Positive Accounting Theory* (PAT) dalam penelitian ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat kerangka teori yang mendukung analisis empiris hubungan antara sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Positive Accounting Theory* (PAT) pada penelitian ini relevan karena teori ini menyediakan landasan untuk menjelaskan dan memprediksi bagaimana sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Positive Accounting Theory* (PAT) dapat menghasilkan wawasan empiris yang mendukung perbaikan tata kelola keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir.

2.1.2 Theory Agency

2.1.2.1 Pengertian Theory Agency

Teori Keagenan *(Agency Theory)* merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pihak prinsipal (pemilik wewenang atau pemberi mandat) dengan pihak agen (penerima mandat) dalam sebuah kontrak kerja, di mana agen diberi kewenangan untuk menjalankan tugas atas nama prinsipal. Dalam konteks sektor publik, pemerintah (agen) bertindak atas nama masyarakat (prinsipal) untuk mengelola keuangan negara dan menyajikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

masalah keagenan dapat muncul ketika terdapat asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, yang dapat menyebabkan penyimpangan, manipulasi informasi, atau ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan dan pengendalian, seperti sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi, serta peningkatan kompetensi SDM, guna meminimalisasi risiko keagenan dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pelaporan keuangan. Dengan demikian, agency theory menjadi landasan penting dalam menelaah bagaimana faktor-faktor internal organisasi pemerintah dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan yang menjadi hak publik untuk diketahui.

Agency Theory, menjelaskan hubungan antara manajemen dan pemilik serta bagaimana konflik kepentingan mempengaruhi kebijakan akuntansi. Keterkaitan adanya teori agensi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pelaporan keuangan, dimana pemerintah bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (agen) maka berkewajiban untuk mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pihak yang memiliki kepentingan sebagai pengguna informasi yang dimana bertindak sebagai principal untuk menilai akuntabilitas dan memutuskan kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Hubungan antara pemerintah dan pemilik kepentingan sebagai pengguna informasi laporan keuangan dapat dikaitkan adanya hubungan keagenan.

Teori keagenan (*Agency Theory*) memiliki kaitan yang erat dengan seluruh variabel dalam penelitian ini, yaitu sistem pengendalian internal, penerapan sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan. Dalam perspektif teori ini, pemerintah daerah sebagai agen memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya publik dan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (prinsipal). Untuk mengurangi risiko terjadinya asimetri informasi dan perilaku oportunistik, diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif agar proses pelaporan keuangan berjalan sesuai aturan dan dapat dipercaya.

Selain itu, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan standar (SAP) menjadi alat formal yang digunakan agen untuk menyajikan informasi keuangan secara transparan dan akuntabel. Sementara itu, kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor pendukung utama dalam menjalankan tugas pelaporan, karena agen yang kompeten akan cenderung bekerja secara profesional dan taat aturan. Semua variabel tersebut pada akhirnya memengaruhi kualitas laporan keuangan yang menjadi dasar masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah. Dengan demikian, *agency theory* memberikan kerangka teoritis yang kuat dalam menjelaskan pentingnya tata kelola yang baik demi menjaga hubungan yang sehat antara agen dan prinsipal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu & Kanita (2023), berfokus pada pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Meskipun teori agency tidak disebutkan secara eksplisit dalam jurnal ini, kerangka pikir yang digunakan sangat relevan dengan prinsip-prinsip dalam teori *agency*. Dalam teori *agency*, pemerintah daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

(sebagai agen) memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat (sebagai prinsipal). Kualitas laporan keuangan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban agen kepada prinsipal. Untuk menjaga akuntabilitas ini, agen harus memiliki sistem yang dapat dipercaya dan diawasi, seperti Sistem Pengendalian Internal (SPI), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Rahayu & Kanita, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial, hanya Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Teknologi Informasi (TI) tidak signifikan. Temuan ini mencerminkan bagaimana mekanisme pengawasan internal berperan penting dalam hubungan keagenan untuk memastikan informasi keuangan yang disajikan benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori *agency* yang menekankan pentingnya pengendalian dan pengawasan guna meminimalkan asimetri informasi dan memastikan agen bertindak sesuai kepentingan principal (Rahayu & Kanita, 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gustina (2021), secara tidak langsung berlandaskan pada kerangka berpikir teori keagenan (*agency theory*), di mana pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang berkewajiban menyusun laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai prinsipal. Dalam konteks ini, kualitas laporan keuangan menjadi instrumen utama dalam mencerminkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

hasil penelitiannya, ditemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sementara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan. Temuan ini sejalan dengan teori *agency* yang menekankan pentingnya mekanisme pelaporan dan sistem informasi yang akuntabel dalam mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Meskipun pengendalian internal merupakan bagian dari mekanisme pengawasan, efektivitasnya dapat berbeda tergantung pada kualitas implementasi dan kompetensi sumber daya manusia yang menjalankannya (Gustina, 2021).

Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa kualitas informasi keuangan yang dilaporkan oleh agen (pemerintah) sangat dipengaruhi oleh struktur sistem akuntansi yang diterapkan, bukan hanya dari sisi formalitas pengendalian, tetapi dari substansi bagaimana informasi tersebut dicatat, diringkas, dan disajikan secara tepat dan dapat dipahami. Oleh karena itu, teori *agency* menjadi landasan yang relevan dalam menjelaskan pentingnya penerapan sistem yang transparan dan profesional agar laporan keuangan benar-benar mencerminkan kinerja pemerintah sebagai agen publik (Gustina, 2021).

Penelitian oleh Binawati & Nindyaningsih (2022), secara tidak langsung mengacu pada kerangka teori *agency*, yang menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen (pengelola keuangan daerah) dan masyarakat sebagai prinsipal (pemilik wewenang). Dalam konteks ini, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas penggunaan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

daya yang dikuasainya. Teori *agency* menjadi relevan karena dalam penyusunan laporan keuangan, terdapat potensi asimetri informasi dan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme tata kelola dan pengendalian, seperti: penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai alat formal untuk menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kompetensi sumber daya manusia untuk memastikan kemampuan teknis dan integritas aparatur penyusun laporan, sistem pengendalian intern untuk mencegah kecurangan dan kesalahan pelaporan, dan Pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan keandalan informasi keuangan (Binawati & Nindyaningsih, 2022).

Penelitian ini membuktikan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, baik secara parsial maupun simultan. Hasil ini konsisten dengan prinsip dasar teori agency yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam hubungan keagenan. Dengan penguatan sistem dan kompetensi, risiko informasi yang menyesatkan dapat ditekan, sehingga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan pemerintah dapat ditingkatkan (Binawati & Nindyaningsih, 2022).

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2017), tentang laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan yang disajikan oleh suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Entitas atau Organisasi. Adapun tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan suatu informasi mengenai posisi keuangan yang akan digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi. Laporan Keuangan juga digunakan untuk menunjukkan hasil pertanggungjawaban managemen atas penggunaann sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Kualitas laporan keuangan adalah kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai laporan keuangan (Sofyan Syafri Harahap, 2013). Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Bastian, 2010).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Rasdianto, 2013). Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang disusun dengan prinsip akrual dan memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan ini harus mampu menyajikan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas pemerintahan secara wajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Menurut Watts & Zimmerman (1986), PAT menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun tidak hanya untuk mencerminkan kondisi keuangan secara objektif, tetapi juga dipengaruhi oleh motivasi manajer atau agen, seperti kepentingan politik, kontraktual, atau kompensasi. Kualitas laporan keuangan dalam kerangka PAT dapat dipertahankan melalui mekanisme tata kelola yang baik seperti sistem pengendalian internal, pengawasan legislatif, dan transparansi. Menurut Jensen & Meckling (1976), Dalam teori keagenan, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban dari agen (pemerintah) kepada prinsipal (masyarakat). Laporan keuangan yang berkualitas membantu mengurangi asimetri informasi dan meminimalisir konflik kepentingan antara kedua pihak. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

2.1.3.2 Indikator Laporan Keuangan

Menurut Mursyidi (2013), Indikator laporan keuangan yang berkualitas mencakup dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang berkualitas juga harus menyajikan informasi yang lengkap, mencakup harta, utang, modal, pendapatan, kewajiban, dan beban perusahaan. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Dapat Dipahami (*Understandability*), Laporan keuangan harus disajikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang akuntansi dan bisnis.

2. Relevan (*Relevance*), Informasi dalam laporan keuangan harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pengguna. Informasi yang relevan dapat membantu pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta mengonfirmasi atau mengoreksi ekspektasi mereka.
3. Keandalan (*Reliability*), Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari kesalahan material dan penyajian yang menyesatkan. Laporan keuangan harus jujur dalam merepresentasikan transaksi dan peristiwa yang terjadi, serta dapat diverifikasi oleh pihak lain.
4. Dapat Dibandingkan (*Comparability*), Laporan keuangan harus memungkinkan pengguna untuk membandingkan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas dari waktu ke waktu dan dengan entitas lain. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi tren dan pola yang signifikan.

Selain karakteristik tersebut, laporan keuangan juga harus memenuhi persyaratan penyajian yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), seperti penyajian secara wajar, kepatuhan terhadap standar akuntansi, kelangsungan usaha, dasar akrual, materialitas, agregasi, saling hapus, frekuensi pelaporan, informasi komparatif, dan konsistensi penyajian.

2.1.3.3 Tujuan Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 tahun 2018, mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

1. Memberikan segala macam informasi keuangan selama kurun waktu tertentu (periode akuntansi/satu tahun), misalnya informasi tentang :
   a. Perubahan aset/harta, utang, dan modal (bertambah, berkurang, atau tetap).
   b. Rasio pertumbuhan ekonomi perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan laporan keuangan per tahun.
   c. Jenis-jenis asset atau harta yang dimiliki, misalnya kendaraan, tanah, gedung, serta uang kas (tunai), jenis-jenis utang bila ada, termasuk juga jenis-jenis modal, misalnya modal saham dan nonsaham, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan.
2. Memberikan penilaian tentang kondisi perusahaan pada saat itu, misalnya apakah kondisi perusahaan termasuk sehat atau tidak bila jumlah utang melebihi jumlah asset atau sebaliknya.
3. Membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat putusan penting setelah membaca dan menganalisis laporan keuangan.

Secara keseluruhan, laporan keuangan memberikan informasi komprehensif tentang posisi keuangan perusahaan, termasuk perubahan dalam aset, utang, dan modal, serta memberikan dasar untuk analisis pertumbuhan ekonomi dan evaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan (https://pustaka.ut.ac.id).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

2.1.3.4 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas. Penjelasan mengenai jenis-jenis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Neraca

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012), neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva (aset), liabilitas (kewajiban), dan ekuitas (modal) suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu. Dengan kata lain, neraca memberikan gambaran tentang apa yang dimiliki perusahaan (aset), apa yang menjadi kewajibannya (liabilitas), dan apa yang menjadi hak pemilik (ekuitas) pada saat laporan tersebut dibuat. Unsur-unsur yang ada dalam neraca antara lain sebagai berikut :

a. Aktiva (Aset)

Aset/aktiva/harta adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Aset dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1) Aset lancar adalah aset yang memiliki umur kurang dari satu tahun atau aset yang mudah diuangkan dan dicairkan, misalnya : kas, piutang, wesel tagih, perlengkapan, beban dibayar dimuka, persediaan.
2) Investasi jangka panjang adalah aset yang memiliki manfaat ekonomis lebih dari satu tahun yang tidak dipergunakan untuk kegiatan ekonomi atau operasional perusahaan, misalnya bentuk yang dibiarkan begitu saja, saham dan obligasi.

3) Aset tetap adalah aset yang memiliki manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, yang secara umum dibedakan menjadi berwujud dan tidak berwujud.

b. Kewajian (Liabilitas)

Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban jangka pendek adalah utang atau kewajiban yang memiliki umur (atau harus dilunasi) dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, yang meliputi : utang usaha, wesel bayar, beban yang masih harus dibayar.

2) Kewajiban jangka panjang adalah utang atau kewajiban memiliki umur (atau harus dilunasi) lebih dari satu tahun, meliputi: obligasi, hipotik, dan utang bank.

c. Modal (Ekuitas)

Modal adalah asset bersih yang didapatkan dari semua aset dengan kewajiban.

2. Laporan Laba-Rugi

Menurut Kasmir (2018), Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Selisih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita perusahaan. Laporan laba rugi pada dasarnya hanya memuat dua hal, yaitu total pendapatan dan total beban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

a. Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi (bertambahnya modal/asset atau menurunnya kewajiban) yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan, misalnya penjualan, pemberian jasa pada klien, dan pendapatan dari kegiatan non operasional seperti penjualan surat berharga atau aset tetap.

b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi (penurunan modal aset atau bertambahnya kewajiban) karena aktivitas operasional perusahaan, misalnya beban gaji karyawan, dan aktivitas non operasional perusahaan, misalnya beban penyusutan.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal menurut Agus Purwaji (2016), adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Laporan perubahan modal adalah laporan mengenai posisi modal organisasi atau perusahaan pada saat tertentu. Laporan perubahan modal dibuat setelah pembuatan laporan laba rugi. Laporan perubahan modal berisi modal awal ditambah dengan laba. Namun, bila rugi berarti dikurangi dengan jumlah rugi.

4. Laporan Arus Kas

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 2), Laporan arus kas adalah laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Perusahaan atau organisasi perlu mengetahui jumlah kas yang benar-benar tersedia pada perusahaan. Kegiatan perusahaan terkait dengan masuk dan keluarnya kas terdiri atas tiga kegiatan, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

a. Aktivitas operasi, Arus kas dari kegiatan operasi antara lain dapat berupa arus kas dari transaksi penjualan, pembayaran ke pemasok, karyawan, bunga beban operasional lainnya dan pajak penghasilan. Aktivitas investasi, Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan arus kas masa depan.

b. Aktivitas pendanaan, Arus kas aktivitas pendanaan, dapat berupa penerimaan kas dari saham dan obligasi, pembayaran deviden, serta pelunasan pinjaman.

2.1.3.5 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), disusun berdasarkan penerapan akuntansi basis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing laporan:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja negara/daerah selama periode tertentu, dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
2. Laporan Operasional (LO): Menyajikan informasi mengenai seluruh pendapatan dan beban pemerintah selama periode pelaporan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL): Menunjukkan perubahan saldo anggaran lebih dari suatu periode ke periode berikutnya, yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja.
4. Neraca: Menunjukkan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu, meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
5. Laporan Arus Kas (LAK): Menunjukkan aliran masuk dan keluar kas dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas: Menunjukkan perubahan ekuitas pemerintah selama periode pelaporan.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): Memberikan penjelasan rinci dan informasi tambahan mengenai penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Laporan-laporan ini disusun secara berjenjang dan saling terkait, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah.

2.1.3.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Dalam Setyowati, dkk. (2016), faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan instansi, yaitu :

1. Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

   Pemanfaatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005, tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah suatu sistem mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan

dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, sedangkan informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki makna kompetensi yang mengandung bagian kepribadian mendalam dan melekat pada seseorang dalam perilaku yang dapat diprediksi di berbagai keadaan serta tugas pekerjaan yang dapat diukur dari kriteria yang sudah ditetapkan atau standar yang digunakan.

3. Peran Internal

Peran internal auditing merupakan suatu aktivitas independen, keyakinan objektif, konsultasi yang dirancang untuk memberikan tambah dan mengingatkan operasi organisasi serta membantu organisasi mencapai tujuan dengan menerapkan pendekatan yang sistematis, berdisiplin untuk mengevaluasi, meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Kualitas laporan keuangan pemerintah menjadi variabel dependen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti, sistem pengendalian internal untuk meminimalkan risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan kepercayaan publik, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang membantu pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengurangi tekanan eksternal dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

meningkatkan reputasi dan kompetensi sumber daya manusia bahwa organisasi memilih kebijakan akuntansi yang mendukung penyusunan laporan keuangan berkualitas untuk mengurangi biaya informasi dan konflik kepentingan antara pemerintah dan publik.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

2.1.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta, berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau *fraud* (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2018).

Sistem pengendalian internal dianggap sebagai respons terhadap motivasi kontraktual yang mendorong manajemen menyajikan laporan keuangan tertentu demi kepentingan pribadi atau politik. Dengan adanya sistem pengendalian yang kuat, distorsi dalam pelaporan keuangan akibat motif manajerial dapat diminimalisir (Watts & Zimmerman (1986). Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan bagian dari insfrastrktur akuntansi yang memastikan informasi keuangan disajikan dengan benar dan sesuai standar yang mendukung asumsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Positive Accounting Theory (PAT), bahwa organisasi bertindak untuk meminimalkan risiko melalui kebijakan dan prosedur internal (Arens dkk., 2020).

Dalam perspektif Agency Theory, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai alat pengawasan (monitoring mechanism) untuk mengurangi perilaku oportunistik agen (pemerintah) yang mungkin menyalahgunakan kewenangan dalam mengelola sumber daya publik. Mekanisme pengendalian ini membantu meminimalkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal (masyarakat), serta memastikan keandalan laporan keuangan (Jensen & Meckling, 1976).

2.1.4.2 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal pemerintah, Indikator sistem pengendalian internal (SPI) merujuk pada tanda-tanda atau elemen-elemen yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi. Unsur-unsur SPI yang umum diukur meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing unsur:

1. Lingkungan Pengendalian

   Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya. Untuk menciptakan

kondisi yang kondusif, hal-hal yang diperlukan adalah menciptakan suasana dan kesadaran tentang pentingnya pengendalian dalam suatu organisasi.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan-kemungkinan kejadian yang akan terjadi yang dapat mengancam terhadap pencapaian tujuan dan sasaranorganisasi. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Perangkat Daerah menetapkan tujuan Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkat kegiatan. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mungkin timbul dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yangdiperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaankebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risikotelah dilaksanakan secara efektif. Mencakup berbagai tindakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapatdigunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraantugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Mencakup sistem informasi yang andal dan proses komunikasi yang efektif untuk mendukung pengendalian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

5. Pemantauan Pengendalian

Pemantauan pengendalian intern adalah prosespenilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yangmemberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian secara berkelanjutan.

Penerapan kelima unsur ini secara terintegrasi diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Organisasi pemerintah daerah mengadopsi sistem pengendalian internal yang lebih baik untuk mendapatkan opini positif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan sistem pengendalian internal yang efektif penelitian mencerminkan prinsip *Positive Accounting Theory* (PAT), bahwa organisasi bertindak untuk mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan pemerintah.

2.1.4.3 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan Sistem Pengendalian Internal Suatu pengendalian yang efektif dan efesien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Mulyadi (2010), tentang tujuan Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah :

1. Menjaga kekayaan organisasi, Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

   Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.

3. Mendorong efesiensi

   Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efesien.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

   Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen metapkan kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.

Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal diatas maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar hal ini dapat memberikan bantuan yang utama terhadap kekayaan perusahaan dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik. Apabila struktur pengendalian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

internal suatu perusahaam lemah maka akan timbul kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan.

2.1.5 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.5.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Dalam keputusan Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1), tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (Menteri Dalam Negeri, 2002).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer (Menteri Dalam Negeri, 2006).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah sistem yang terdiri atas serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang saling berhubungan, metode dan alat yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, menganalisis dan melaporkan informasi keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditunjukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak internal dan eksternal pemerintahan daerah untuk mengambil keputusan ekonomi (Nordiawan, 2006).

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sarana yang memungkinkan agen untuk menyusun laporan keuangan sesuai kepentingannya, misalnya untuk mendapatkan insentif atau menjaga citra politik. PAT memandang bahwa penyusunan laporan tidak bebas nilai, namun dipengaruhi oleh kontrak dan kepentingan manajerial. Oleh karena itu, perlunya regulasi dan pengendalian agar sistem akuntansi benar-benar mencerminkan informasi yang objektif dan tidak bias (Watts & Zimmerman, 1986).

Dalam kerangka *Agency Theory*, sistem akuntansi keuangan daerah merupakan alat yang digunakan oleh agen (pemerintah daerah) untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada prinsipal (masyarakat). Sistem ini berfungsi mengurangi asimetri informasi melalui penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan sistem akuntansi yang baik, informasi keuangan menjadi lebih andal dan mencegah penyalahgunaan wewenang (Jensen & Meckling, 1976).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

2.1.5.2 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) mencakup kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), prosedur pencatatan yang jelas dan sesuai standar, serta penyusunan laporan keuangan secara periodik. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, menetapkan tiga indikator untuk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), yaitu:

1. Kesesuaian terhadap Sistem Akuntansi keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem akuntansi keuangan daerah harus mengacu pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku pada saat ini yaitu bebrbasis akrual. Basis akrual yaitu mengakui transaksi keuangan pada saat terjadinya yaitu ketika sudah menjadi hak atau kewajibannya meskipun belum diterima atau dikeluarkan kasnya.
2. Proses pencatatan akuntansi disatuan kerja sesuai dengan prosedur pencatatan standar akuntansi keuangan daerah, Sistem akuntansi keuangan daerah harus dilakukan berdasarkan pencatatan yang berlaku umum yaitu dimana setiap transaksi keuangan yang terjadi dilakukan analisis transaksi di sertai bukti transaksi serta pencatatan transaksi harus di lakukan secara kronologis. Adapun komponen laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
3. Pembuatan laporan keuangan yang dilaporkan secara periodik, Sistem akuntansi keuangan daerah menyusun laporan keuangan daerah untuk

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan. Laporan keuangan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik guna kepentingan pengambilan keputusan.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) seperti standar berbasis akrual adalah respon pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan seperti Peraturan Pemertintah No. 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sistem akuntansi keuangan daerah membantu pemerintah daerah memperoleh opini audit yang lebih baik, seperti opini Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP), yang meningkatkan kepercayaan publik, mencerminkan prinsip *Positive Accounting Theory* (PAT), bahwa organisasi bertindak untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentigan, meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi melalui kebijakan akuntansi yang sesuai dengan regulasi.

2.1.5.3 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Tujuan utama Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Informasi ini digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Berikut adalah beberapa tujuan rinci dari SAKD:

1. Penyediaan Informasi Keuangan: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan andal untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

berbagai pihak, baik internal (manajemen pemerintah daerah) maupun eksternal (masyarakat, DPRD, auditor).

2. Pertanggungjawaban (Akuntabilitas): Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pihak-pihak terkait.

4. Pengawasan: Sistem ini memfasilitasi pengawasan yang efektif terhadap penggunaan anggaran daerah, membantu mencegah penyalahgunaan dan pemborosan.

5. Pengambilan Keputusan: Informasi yang dihasilkan oleh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan, penganggaran, dan kebijakan keuangan daerah.

6. Efisiensi dan Efektivitas: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

7. Transparansi: Dengan adanya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), proses pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, sehingga masyarakat dapat memantau dan menilai bagaimana anggaran daerah dikelola.

8. Kepatuhan: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

9. Peningkatan Kinerja: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk mengukur dan menilai kinerja keuangan daerah, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan.

Dengan demikian, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) bukan hanya sekadar sistem pencatatan keuangan, tetapi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel.

2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.6.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah dimensi perilaku yang berada dibelakang kinerja kompeten (Baron & Armstrong, 2007). Kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu (Mardiasmo, 2018).

Dalam Sudarmanto (2009), kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki seseorang yang menjadi bagian dari dirinya, sehingga dia bisa menjalankan penampilan kognisi, efeksi, dan perilaku psikomotorik tertentu, dari berbagai pandangan dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan menjalankan tugas atau pekerjaan dengan dilandasi oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

pengetahuan, keterampilan dan didukung oleh sikap yang menjadi karakteristik individu.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dipandang sebagai variabel penting yang dapat memengaruhi keputusan manajerial dalam menyusun laporan keuangan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak kompeten atau tidak memiliki integritas tinggi lebih mudah terpengaruh oleh motivasi pribadi atau politik, yang dapat mengarah pada penyimpangan informasi akuntansi. Oleh karena itu, penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi strategi untuk menjaga kualitas informasi yang dilaporkan (Watts & Zimmerman, 1986).

Dalam kerangka *Agency Theory*, kompetensi SDM menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa agen (pemerintah) dapat menjalankan tugas pengelolaan dan pelaporan keuangan dengan akurat, transparan, dan bertanggung jawab kepada prinsipal (masyarakat). Agen yang kompeten akan cenderung lebih patuh terhadap regulasi dan mengurangi risiko informasi asimetris maupun tindakan oportunistik (Jensen & Meckling, 1976).

2.1.6.2 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam Binawati & Nindyaningsih (2022), terdapat empat indikator kompetensi sumber daya manusia, yaitu:

1. Pengetahuan (*Knowledge*) Profesional Yang Diperlukan

   Pengetahuan adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu atau pegawai untuk menjalankan pekerjaanya. Pengetahuan yang dimiliki akan digunakan dalam kegiatan pekerjaan. Dengan pengetahuan yang dimiliki pegawai secara tidak langsung menentukan kinerja perusahaan, jika pegawai

memiliki pengetahuan yang baik akan meningkatkan ke efisiensi perusahaan.

2. Keterampilan Profesional (*Skill*)

   Keterampilan Individu merupakan kemampuan yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugasnya dalam perusahaan, bagaimana mereka menyelesaikan pekerjaan bahkan mengimprovisasi apa yang mampu mempercepat dan memaksimalkan pekerjaannya.

3. Nilai dan Etika (*Attitude*)

   Sikap merupakan pola tingkah pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan aturan-aturan yang perusahaan terapkan. Apa bila pegawai mampu sportif atas sikapnya terhadap perusahaan itu akan mendukung perusahaan dalam pencapaiannya.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan profesional, efektif dan efisien serta, meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan yang membantu organisasi mendapatkan opini positif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.1.6.3 Macam-macam Kompetensi Sumber Daya Manusia

Macam-macam Kompetensi Sumber Daya Manusia Michael Zwell sebagaimana dikutip oleh Wibowo (2013), memberikan lima macam kompetensi, yang terdiri dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

1. *Task achievement*

   Kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan Task achievement ditunjukkan oleh: orientasi pada hasil, mengelola kinerja, mempengaruhi inisiatif, efisiensi produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keahlian teknis.

2. *Relationship*

   Kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya. Kompetensi yang berhubungan dengan Relationship meliputi kerjasama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antar pribadi, kecerdasan organisasional, membangun hubungan, penyelesaian konflik, perhatian pada komunikasi dan sensitivitas lintas budaya.

3. *Personal attribute*

   Kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berfikir, merasa, belajar, dan berkembang. Personal attribute merupakan kompetensi yang meliputi: integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, manajemen stress, berpikir analitis, dan berpikir konseptual.

4. *Managerial*

   Kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan dan mengembangkan orang. Kopetensi manajerial berupa: memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

5. *Leadership*

Kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Kompetensi berkenaan dengan leadership meliputi: kepemimpinan visioner, berpikir strategis, orientasi kewirausahaan, manajemen perubahan, membangun komitmen organisasional, membangun focus dan maksud, dasar-dasar, dan nilai-nilai.

2.1.6.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Michael Zwell sebagaimana yang dikutip oleh Wibowo (2013), mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu sebagai berikut:

1. Keyakinan dan nilai-nilai

   Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat memengaruhi perilaku. Apabila mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berfikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu.

2. Ketrampilan.

   Keterampilan merupakan peran penting di kebanyakan kompetensi. Pengembangan keterampilan yang secara spesifik berkaitan dengan kompetensi dapat berdampak baik pada budaya organisasi dan kompetensi individual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

3. Pengalaman

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman berorganisasi, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya.

4. Karakteristik Kepribadian.

Kepribadian dapat mempengaruhi keahlian seorang karyawan dalam sejumlah kompetensi, termasuk dalam penyelesaian konflik, menunjukkan kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam tim, memberikan pengaruh dalam membangun hubungan dalam tim.

5. Motivasi

Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. Dengan memeberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan pengakuan dan perhatianindividual dari atasan dapat berpengaruh positif terhadap motivasi bawahan.

6. Isu Emosional

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif.

7. Kemampuan Intelektual

Kompetensi bergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Faktor pengalaman dapat meningkatkan kecakapan dalam kompetensi.

Jadi secara umum, kompetensi sumber daya manusia adalah tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang guna melakukan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Semakin tinggi kemampuan dan pengetahuannya, maka semakin tinggi juga kualitas kompetensi sumber daya manusianya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu adalah studi atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan memiliki relevansi dengan topik penelitian yang sedang dikerjakan (Sugiyono, 2018). Peneliti mencantumkan berbagai hasil yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Ringkasan penelitian terdahulu disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu

No.	Nama Pengarang/Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Hasil Penelitian
1.	Sri Rahayu & Alfanisha Dewi Kanita (2023)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan keuangan	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem pengendalian Internal pada OPD berpengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

		Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022) Jurnal Ekombis Review-Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 11 No. 1 E-ISSN: 2716-0246 DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v	positif signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di OPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Secara parsial variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan Daerah Pada OPD Provinsi DKI Jakarta, Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada OPD Provinsi DKI Jakarta, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada OPD Provinsi DKI Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

2.	Enita Binawati & Cyrenia Tri Nindyaningsih (2022)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 19 No.1 ISSN: 2085-3688	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penentuan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Penatagunaan Keuangan Daerah yang dibuktikan dari hasil uji simultan (Uji F). Secara parsial menunjukkan hasil Sistem Akuntansi Daerah, Kompetensi menentukan Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Akuntansi Keuangan Daerah yang dibuktikan dari hasil uji parsial (Uji t).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

3.	Ira Gustina (2021)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 10, No. 1 E-ISSN: 2598-7372	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Sistem Akuntasni Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
4.	Kartika Dwi Indrayani & Harjanti Widiastuti (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

		Kabupaten Klaten) Jurnal Review Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 4 No. 1 E-ISSN: 2614-957 DOI: https://doi.org/10.1196/rab.040148	berpengaruh positif dalam memoderasi Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5.	Siti Mispa & Nuramal (2022)	Pengaruh Sistem Pengendalia Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan YUME: Journal of Management, Vol. 5 No. 2 E-ISSN: 2614-8034 DOI: https://doi.org/10.37531/yume.vxix.3456	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Komeptensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

6.	Defiana & Halmawati (2023)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada OPD Kabupaten Simalungun JNKA-Jurnal Nuansa Karya Akuntansi, Vol. 1 No. 2, Agustus 2023, Hal. 203-215 E-ISSN: 2988-2702 DOI: https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.16	Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel, yaitu kompetensi SDM, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Uji simultan menunjukkan pengaruh yang signifikan secara bersama-sama, dengan koefisien determinasi R^2 sebesar 0,587. Ini berarti 58,7% variasi kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut.
7.	Dinda Putri & Nunung A. R. (2023)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bandung	Hasil penelitian membuktikan bahwa baik sistem pengendalian internal maupun kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.

		Barat JBB- Journal of Business and Banking, Vol. 13 No. 1, Mei-Oktober 2023, Hal. 157-175 ISSN: 2088-7841 DOI: https://doi.org/10.14414/jbb.v13i1.3738	Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,718 menunjukkan bahwa kontribusi dua variabel ini sangat tinggi dalam menjelaskan variabilitas laporan keuangan.
8.	Made Ariada & Nyoman Ari S. D. (2023)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada OPD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021) Jurnal Akuntansi Profesi, Vol. 14 No. 2 E-ISSN: 2686-2468 DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jippg.v3i2	Penelitian ini membuktikan bahwa ketiga variabel independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikansi masing-masing < 0,05. Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,342 menunjukkan kontribusi moderat dari ketiga variabel terhadap kualitas laporan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

9.	Mega Suryani Hutabri (2023)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah AFRE-Accounting and Financial Review, Vol. 6 No.3, Hal. 330-336 ISSN: 2598-7763 E-ISSN: 2598-7771 DOI: https://doi.org/10.26905/afr.v6i3.8401	Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengarh posstif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan. R^2 = 0,609
10.	Nur Isnaini Machmudiyanti & Muhammad Aufa (2023)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Gresik RIMBA: Riset Ilmu Manajemen Bisnis	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan (10%) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,

		dan Akuntansi, Vol. 1 No. 4, Hal. 310-330 E-ISSN: 2988-6880 DOI: https://doi.org/10.61132/rimba.v1i4.312	sedangkan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. R^2 = 0,483
11.	Mega Astuti, Retno Wulandari & Supami Wahyu Setyowati (2024)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Jurnal Akuntansi Neraca, Vol. 1 No. 4 E-ISSN: 2987-1352	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah & Komeptensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan.
12.	Annisa Fitriani & Mahmudi (2025)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal serta Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

		Kualitas Laporan Keuanga Pemerintah Daerah Bulungan Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, Vol. 7 Hal. 37-49	Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
13.	I Gusti Ayu Krisna Dewi & Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi (2020)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bali Jurnal Akuntansi Profesi, Vol. 11 No. 1, Juni 2020 E-ISSN: 2686-2468	Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah , Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan Sistem Pengendalian Inetrnal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

			pemerintah daerah.
14.	Ilda Putri Insirohmawati (2024)	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Komeptensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Di BPPKAD Kabupaten Ponorogo JAPP: Jurnal Akuntansi, Vol. 4 No. 1 E-ISSN: 2808-098	Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ponorogo
15.	Astrit Dwi Fitriani, Aris Eddy S & Fadjar Harimurti (2025)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Inetrnal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

		YUME: Journal of Management, Vol. 8 No. 2, Hal. 263-275 E-ISSN: 2614-851	kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan.

Sumber: *Hasil Kajian Penulis, 2025.*

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep atau teori yang mendasari serta menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian. Kerangka pemikiran digunakan untuk menggambarkan suatu penelitian yang dilakukan, uraian tentang hubungan antara variabel yang tarkait dengan masalah yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah. Kerangka ini membantu peneliti untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa hubungan antar variabel terjadi serta merancang metode penelitian yang tepat untuk menguji hubungan tersebut (Sugiyono, 2018).

Laporan keuangan pemerintah daerah sering kali mendapat perhatian karena ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan opini audit yang rendah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi indikator penting untuk menilai kualitas laporan keuangan memberikan kerangka pemikiran variabel independen berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah diukur melalui relevansi, keandalan, perbandingan dan pemahaman.

Berangkat dari opini WTP berturut-turut yang diraih Pemerintah kab. Indragiri Hilir, namun dengan asumsi bahwa tidak semua komponen pelaporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

keuangan dikuasai oleh sumber daya manusia secara merata. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sebagai landasan pelaporan akuntansi pemerintah daerah. Teori yang digunakan secara implisit adalah *Agency Theory*, di mana pemerintah sebagai agen harus bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai prinsipal melalui laporan keuangan yang berkualitas.

Peran sistem pengendalian internal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, menekankan pentingnya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan pemantauan. Lemahnya pengendalian internal sering menjadi penyebab ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku memberikan kerangka pemikiran sistem pengendalian internal yang efektif akan meningkatkan keandalan dan relevansi laporan keuangan pemerintah dimana proses pengendalian internal yang baik membantu mencegah kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) banyak daerah, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi kesulitan dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kesulitan ini mencakup kurangnya infrastruktur, pelatihan dan pemahaman teknis memberikan kerangka pemikiran penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Dalam penelitian Rahayu & Kanita (2023), kerangka pemikiran ini menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Penerapan SAKD memungkinkan proses pelaporan yang sistematis dan sesuai standar, sedangkan sistem pengendalian intern berfungsi sebagai pengawasan untuk menjamin keakuratan dan kepatuhan terhadap regulasi (Rahayu & Kanita, 2023).

Dalam penelitian Gustina (2021), menjelaskan kerangka pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) dianggap mampu meningkatkan keandalan dan kepatuhan dalam proses pelaporan, sementara penerapan SAKD yang baik menjamin laporan keuangan disusun secara sistematis sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan yang berkualitas diukur dari relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami, sehingga penerapan kedua sistem tersebut diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah (Gustina, 2021).

Dalam penelitian Mispa & Nuramal (2022), penelitian ini membangun kerangka pemikiran bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia. SPI berperan dalam mendeteksi dan mencegah kesalahan dalam pelaporan, SAKD menyusun proses pelaporan keuangan yang sesuai prinsip akuntansi, dan kompetensi SDM menjadi elemen penting karena pelaporan yang akuntabel bergantung pada kemampuan pegawai dalam mengelola data keuangan. Ketiga faktor tersebut secara teoritis diyakini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang informatif dan dapat dipercaya (Mispa & Nuramal, 2022).

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting untuk memahami dan menerapkan standar akuntansi. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dibidang akuntasi dan keuangan menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan memberikan kerangka pemikiran kompetensi sumber daya manusia yang kompeten lebih mampu menyusun laporan keuangan yang relevan, andal dan sesuai standar.

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran penelitian, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan antara sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan pemerintah. Secara garis besar kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

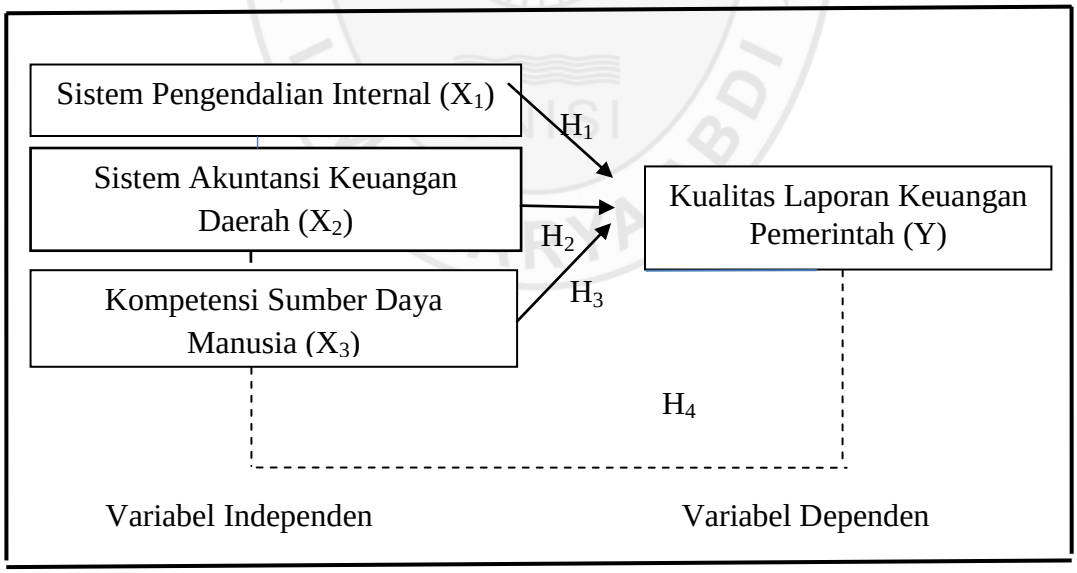

Gambar 1: Kerangka Pemikiran

Keterangan :

X_1 = Sistem Pengendalian Internal

X_2 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X_3 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

= Secara Parsial

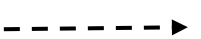 = Secara Simultan

Kerangka pemikiran menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan secara simultan juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menguji hubungan tersebut melalui pendekatan empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal, meningkatkan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan membangun kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) demi tercapainya laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2019). Berdasarkan kerangka pemikiran, hipotesis yang diambil adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

H_1 = Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

H_2 = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

H_3 = Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

H_4 = Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri